GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia **Tgl/Bln/Thn : 15/1/2005**

Subyek : **Hari : Sabtu**

Kata Kunci : **Halaman : 24**

Mangrove di Pantai Barat Aceh dan Utara Jawa akan Direhabilitasi

BANDUNG (Media): Pascabencana tsunami, Departemen Kehutanan akan melakukan rehabilitasi area hutan mangrove di pantai barat Aceh, karena kondisinya sudah rusak parah. Selain itu, penanaman kembali pohon-pohon bakau juga akan dilakukan di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Hal itu dikatakan Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban ketika menghadiri acara penanganan lahan kritis yang diselenggarakan Universitas Islam Bandung (Unisba) di Gunung Sumbul, Kabupaten Sumedang, Kamis (13/1).

"Dari sekitar 3 juta hektare (ha) kawasan tanaman mangrove di Indonesia, 600.000 ha di antaranya dalam kondisi rusak parah, terutama di pantai barat Aceh dan sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Departemen Kehutanan memiliki dana yang siap digunakan untuk itu sebesar Rp800 miliar," jelas MS Kaban. Menurut Menhut, untuk menggulirkan program penanaman kembali hutan mangrove, pihaknya masih menunggu persetujuan DPR. Persetujuan ini diperlukan sebagai sebuah program baru, karena selama ini rehabilitasi hanya dikenal di daerah aliran sungai (DAS) dan lahan kritis.

Selain pantai barat Aceh dan pantai utara Pulau Jawa, lanjutnya, titik kerusakan hutan mangrove lainnya terdapat di Sulawesi, Bali, dan Sumatra Utara. Jika program ini bisa digulirkan, diyakini dalam waktu lima tahun, penanaman bisa diselesaikan di lima titik tersebut. "Kita belum tahu secara rinci dana yang dibutuhkan untuk penghijauan pantai-pantai kritis tersebut, karena masih dihitung, dan baru tiga bulan ke depan bisa diketahui secara pasti. Selain itu, penanaman kembali hutan mangrove juga bukan persoalan mudah, karena ada beberapa kendala," jelasnya.

Kendala itu, antara lain sifat hutan bakau sendiri yang rentan dengan tantangan alam dan pertumbuhannya sangat lama hingga mencapai 10 tahun. Selain itu, wilayah, seperti pantai utara Pulau Jawa juga sudah banyak tercemar oleh berbagai limbah.

Kaban menegaskan kendala-kendala seperti itu harus dibereskan dulu dan lahan disiapkan sebaik-baiknya. Sementara masyarakat sekitar juga harus diberdayakan, dan sosialisasi untuk menghijaukan pantai harus dilakukan secara terus menerus.

"Sudah menjadi bukti, di daerah yang hutan mangrovenya terpelihara, bahaya tsunami bisa dikurangi. Tidak ada pilihan, Departemen Kehutanan harus menanam mangrove lagi, karena bencana seperti di Aceh ternyata terlalu mahal untuk semua," lanjut Menhut.

Sementara itu, dalam seminar ekonomi dan lingkungan yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kamis (13/1) di Jakarta, Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup Arief Yuwono menjelaskan, kerusakan hutan mangrove di pesisir pantai Indonesia kritis. Ia memberi contoh banyak orang membabat hutan mangrove untuk dijadikan tambak udang karena dinilai menguntungkan. Ketika pasar udang jelek, mereka bangkrut maka tambak udang ditinggal begitu saja. Akibatnya tata ruang pesisir rusak. Pemukiman pun kini telah berada di garis pantai karena tidak ada lagi batasan antara darat dan lautan.

"Berdasarkan penelitian kalau saja hutan mangrove di pesisir masih terpelihara dengan baik, kira-kira 5-10 meter saja, maka masyarakat pesisir masih bisa terlindungi dari gelombang tsunami." Oleh sebab itu, kata Arif, pembangunan Aceh maupun kota-kota lain di Indonesia saat ini harus dilengkapi dengan perlindungan alam. "Kita harus mengembalikan lagi perlindungan alam yang sudah diciptakan Tuhan. Kembalikan lagi hutan agar daratan tidak banjir, tanah tidak longsor. Kembalikan mangrove, flora dan fauna lainnya karena mereka adalah pelindung manusia.

Di tempat yang sama, pakar lingkungan Emil Salim berpendapat pembangunan Aceh pasca tsunami merupakan awal pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sebab berbagai aspek seperti sosial, ekonomi dan lingkungan merupakan penyokong utama pembangunan Aceh secara keseluruhan.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup ini menjelaskan, pembangunan berkelanjutan merupakan penerapan ekonomi-ekologi dalam alokasi sumber daya kehidupan guna mencapai kebutuhan manusia dalam ruang lingkup keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan.

"Pembangunan berkelanjutan mengarustengahkan ketiga alur keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan secara serentak dalam satu arus lingkar pembangunan."

Di masa depan, lanjut Emil, sangat terlihat bahwa daya saing Indonesia dalam kehidupan global bertumpu pada sumber alam hayati yang khas dan unik, tropis serta kearifan penduduk yang beraneka ragam.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP